

Pemanfaatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Pembangunan di Ohoi Ohoiren Kabupaten Maluku Tenggara

Paulus Karmel Ayomi^{1*}, Adam Videlo Huklubuk¹, Marselino Warwuru¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Tual, Indonesia

*Corresponding author : paulayomi03@gmail.com

Article History:

Received : 01-04-2025

Accepted : 06-04-2025

Keywords: Pembangunan

Berkelanjutan; Maluku Tenggara

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang pemanfaatan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap pembangunan di Ohoi Ohoiren Kabupaten Maluku Tenggara. Konsep Sustainable Development Goals bertujuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi. Dari 17 poin Sustainable Development Goals, penelitian ini terpusat pada dua Goals yakni Desa tanpa kemiskinan dan Pendidikan Desa berkualitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan interaktif dan non interaktif, serta menggunakan teori Sachs. Terdapat 29 informan dalam penelitian ini yakni, Penjabat Kepala Desa sebagai informan kunci; 3 Pegawai Kantor Desa, Ketua Badan Saniri Ohoi, 5 masyarakat sebagai informan utama; dan 15 pemuda, 2 pelajar, 2 guru sebagai informan tambahan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, focus group discussion (FGD) dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini, menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengambilan data dilaksanakan selama sebulan penuh di lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa (Ohoi) Ohoiren, Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sejak diterapkannya pembangunan Sustainable Development Goals pada tahun 2022, status desa (Ohoi) Ohoiren masuk dalam kategori berkembang. Goals desa tanpa kemiskinan dan pendidikan di desa (Ohoi) Ohoiren, sangatlah memprihatinkan. Hal ini dibuktikan berdasarkan sumber data yang didapatkan pada situs resmi Kementerian Desa (<https://sidn.kemendesa.go.id>sdgs>).

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah dipopulerkan sejak konferensi lingkungan *Stockholm* tahun 1972. Berdasarkan hal tersebut, pada sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tanggal 25 Desember 2015 di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Pengesahan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2015-2030, secara resmi dihadiri sekurangnya 193 kepala negara, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai perwakilan Indonesia untuk tahun 2030. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2015-2030 secara resmi menggantikan tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) 2000-2015. *Sustainable Development Goals* berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. *Sustainable Development Goals* berisi 17 tujuan. Namun, untuk dapat diterima oleh pelaku di luar bidang lingkungan, konsep dan cara pembangunan berkelanjutan dapat memerlukan waktu yang lama. Dengan adanya deklarasi tentang Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2015, masyarakat di berbagai negara akhirnya memandang penting pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan.

Sustainable Development Goals sangat mendorong kerjasama pembangunan yang lebih luas diantara pemangku kepentingan, tidak hanya di tataran lokal dan nasional. *Sustainable Development Goals* memberikan ruang yang luas bagi kerjasama pembangunan global antar pemangku kepentingan, tidak hanya antar pemerintah, termasuk ke dalam mekanisme kerjasama pembangunan global ini adalah dalam hal pendanaan, peningkatan kapasitas, sumber daya manusia, ahli teknologi serta akses pasar. Pada kesempatan berpidato di *Leaders Read* sesi II Konferensi tingkat tinggi *Group of Twenty* (KTT G-20) di Hamburg, Jerman pada tanggal 7 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para pemimpin negara *Group of Twenty*, tentang komitmen pelaksanaan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Pada 4 Juli 2017, Indonesia menunjukkan komitmen tinggi dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor. 59 Tahun 2017, tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* di Indonesia, dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Dengan adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di desa melalui *Sustainable Development Goals*, maka akan berpengaruh positif terhadap perekonomian. Khususnya pada tujuan pendidikan desa berkualitas yaitu pembangunan ini berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh warga desa dari segala bentuk bencana. Dalam mencapai tujuan tersebut maka target utamanya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan tujuan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi desa juga akan meningkatkan perekonomian yaitu dapat dilakukan dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Selain dua tujuan utama tersebut, tujuan lainnya juga sangat berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia.

Pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals* menjadi perhatian penting pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini berdasarkan dana desa yang belum dirasakan masyarakat, dan belum dapat membangkitkan perekonomian desa secara maksimal. Atas hal tersebutlah pemerintah menerapkan konsep pembangunan melalui *Sustainable Development Goals*. *Sustainable Development Goals* berprinsip pada istilah *no one left behind* untuk pemerataan kesejahteraan. Dalam rekapitulasi kode dan data wilayah administrasi pemerintah seluruh Indonesia disebutkan bahwa saat ini Indonesia memiliki 83.441 desa/setara desa yang tersebar di 34 provinsi. Tidak kurang dari 91% wilayah Indonesia merupakan wilayah perdesaan. Disinilah pentingnya peran *Sustainable Development Goals* Desa dalam pencapaian pembangunan hingga tingkat nasional maupun global mengoptimalkan kemitraan strategis (koran sindo : 28/01/2021).

Salah satu desa yang pembangunannya berbasis *Sustainable Development Goals* adalah Desa (Ohoi) Ohoiren di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam perjalanannya, pemanfaatan *Sustainable Development Goals* terhadap pembangunan Desa dinilai prosesnya kurang baik karena fenomena yang terjadi tidak memiliki peningkatan. Melalui observasi, sejak pembangunan desa berbasis *Sustainable Development Goals*, pertumbuhan ekonomi dianggap gagal dalam bidang pariwisata. Wisata Desa Ohoiren memiliki potensi sebagai destinasi yang akan mendatangi *touris*. Akan tetapi, hal tersebut tidak dikembangkan dengan baik.

Pembangunan *Sustainable Development Goals* pada pertumbuhan ekonomi dianggap gagal dalam bidang pariwisata. Wisata Alam Desa Ohoiren dapat dijadikan sebagai suatu destinasi yang di datangi banyak *touris*. Namun sangat disayangkan hal itu tidak dikembangkan meski desa memiliki potensi. Berdasarkan data melalui Sistem Informasi Desa (SID) Kementrian Desa (Kemendesa) : <https://sidn.kemendesa.go.id>sdgs> yang merupakan situs resmi data *Sustainable Development Goals* desa. Informasi yang didapat yakni status desa masuk dalam kategori berkembang pada tahun 2022 yang dimana hal ini dianggap bahwa pemanfaatannya gagal. Sejak pembangunan berbasis *Sustainable Development Goals* diterapkan, *goals* desa tanpa kemiskinan sangat memprihatinkan karena total 156 keluarga dari 595 jiwa, bantuan sosial tidak lebih dari seperdua keluarga yang mendapatkannya, hanya 33 keluarga yang menerima bantuan sosial. Pendidikan di desa juga lebih sangat memprihatinkan karena sesuai data menunjukkan 18 keluarga sulit mengakses ke Perguruan Tinggi (PT) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga rata-rata pendidikan di Ohoiren hanya meliputi : Sekolah Dasar (21 keluarga) dan Sekolah Menengah Atas (19 keluarga).

Selain itu, skor *Sustainable Development Goals* (SDGs) Ohoi Ohoiren sebesar 43.89. Skor *goals* terendah adalah desa tanpa kemiskinan, yang hanya memiliki skor 4.45 serta 3 dari 18 *goals* tidak memiliki skor. Tiga *goals* ini diantaranya infrastruktur, dan inovasi desa sesuai kebutuhan (*goals* 9); konsumsi, dan produksi desa aman dan nyaman (*goals* 11); dan desa tanggap perubahan iklim (*goals* 13).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menurut Rahmasari (2017 : 90), yakni penelitian kualitatif interaktif dan penelitian kualitatif non interaktif. Lokasi dalam melakukan penelitian ini adalah Desa (Ohoi) Ohoiren, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Pemilihan informan dalam penelitian ini, meliputi Penjabat Kepala Desa sebagai informan kunci, yang memahami pemanfaatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Ohoi Ohoiren; Pegawai Kantor Desa, Ketua Badan Saniri Ohoi, masyarakat sebagai informan utama; dan beberapa pemuda, pelajar, guru sebagai informan tambahan. Teori yang digunakan adalah teori *Sachs*, yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD) dan dokumentasi. Teknik analisa dalam penelitian ini, menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengambilan data dilaksanakan selama sebulan penuh di lokasi penelitian.

PEMBAHASAN

Ohoiren adalah desa di kecamatan kei kecil barat, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Indonesia yang terletak pada 5°46' - 6°2' LS dan 132°25' -132°42' BT. Ohoi Ohoiren memiliki luas 470 hektar, dengan ketinggian 2 m di atas permukaan laut. Ohoi Ohoiren memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Ohoi Ohoira, sebelah selatan berbatasan dengan Ohoi Somlain, sebelah timur berbatasan dengan Hoat Sorbai (Hutan), dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Lima. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tidak bersekolah berjumlah 122 orang, yang Sekolah Dasar (SD) berjumlah 129 orang, yang tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 116 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 133 orang, S-1 berjumlah 20 orang, D-3 berjumlah

5 orang dan lainnya 40 orang. Sehingga jumlah penduduk di Ohoi Ohoiren berjumlah 565 jiwa dengan memiliki 163 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian (pekerjaan) di Ohoiren berbeda-beda, antara lain : Petani pemilik lahan berjumlah 54 orang, bekerja di pengolahan (industri) sebanyak 5 orang, bekerja sebagai nelayan pemilik kapal (perahu) sebanyak 18 orang, bekerja sebagai perangkat desa sebanyak 7 orang, bekerja sebagai buruh tani sebanyak 2 orang, bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai PNS, bekerja sebagai nelayan penyewa kapal (perahu) sebanyak 1 orang.

Pemanfaatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), telah diterapkan sejak tahun 2017 dengan tim pendataan *Sustainable Development Goals* dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Ohoi Ohoiren pada tahun 2017 dan tahun 2021. *Sustainable Development Goals* dalam pemanfaatannya dikatakan berhasil karena setiap tahunnya ada perubahan di Ohoiren. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang miskin mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu SDGs dalam pemanfaatannya melibatkan masyarakat yang juga mendapatkan sosialisasi secara personal pada saat pendataan. Selanjutnya pemanfaatan *Sustainable Development Goals* dibatasi pada dua *goals* yakni desa tanpa kemiskinan dan pendidikan desa berkualitas.

Hasil interpretasi data berdasarkan desa tanpa kemiskinan, dengan pendekatan konsep turunan *Sustainable Development Goals* yaitu 5p (*People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership*) serta teori *Sachs* tentang pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa : Pertama, meningkatnya pendapatan penduduk miskin, karena pemanfaatan SDGs di Ohoiren mengalami kenaikan yang signifikan meskipun tidak menentu setiap bulannya. Namun hal ini sangat menjadi perhatian pemerintah Ohoi Ohoiren dalam upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu pembangunan pariwisata yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Ohoiren dengan berdagang ataupun sebagainya. Selain itu, adanya usaha-usaha kecil milik masyarakat akan didorong untuk dijual keluar, sebut saja embal yang menjadi makanan pokok orang Kei.

Adanya kelompok pemberdayaan yang memiliki peranan penting dalam peningkatan pendapatan penduduk. Kelompok pemberdayaan di Ohoiren antara lain, nelayan dan petani serta pengrajin yang pendapatannya di atas Rp. 2.000.000,00. Pendapatan ini didapatkan bukan hanya penjualan dari ohoi namun diekspor keluar melalui kerjasama dengan perusahaan ikan di perairan ohoi ur. Dilain sisi, masyarakat geram dengan kebijakan pemerintah ohoi dalam persoalan tersebut karena banyaknya data manipulasi yang dilakukan. Namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab sejak tahun 2017 sampai 2022, tim pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ohoiren selalu melakukan pendataan dan penginputan data *Sustainable Development Goals* (SDGs) Ohoiren.

Kedua, terjaminnya akses terhadap pelayanan dasar dengan baik karena adanya bukti melalui infrastruktur Ohoi, salah satunya yakni posyandu Ohoi yang fokus pelayanannya terhadap Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan penyandang disabilitas. Akses pelayanan dasar pun sangat terjamin melalui penyediaan Sekolah Dasar di Ohoiren sebagai upaya pendidikan anak bangsa. Ketiga, memiliki kartu jaminan kesehatan untuk Janda dan Penyandang Disabilitas. Namun Pemerintah Ohoi Ohoiren merencanakan dalam tahun 2024 akan diadakan kartu jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan fokus pada masyarakat yang tergolong miskin.

Keempat, akses air minum dan sanitasi untuk penduduk berpenghasilan rendah sejak tahun 2021, pemerintah Ohoi Ohoiren telah bermitra dengan pemerintah supradesa untuk pemasangan air PAM di Ohoiren. Namun pada tahun 2022 adanya konflik Ohoiren dan Ohoidertutu menyebabkan material air PAM di Ohoiren mengalami kerusakan. Sehingga air PAM yang terpasang di Ohoiren tidak terlalu dinikmati oleh masyarakat karena kurangnya pemasokan debit air. Untuk sanitasi di Ohoiren, melalui pemerintah ohoi diberikan bantuan-bantuan kepada setiap keluarga berupa jamban serta MCK. Kelima, hunian layak huni masyarakat di desa ohoiren dapat dikatakan sebayak rumah layak huni. Pemerintah ohoi melalui dana desa memberikan sentuhan kepada masyarakat berupa bantuan bedah rumah untuk masyarakat dengan tipe bantuan yaitu per rumah per keluarga.

Hasil interpretasi data berdasarkan pendidikan desa berkualitas menunjukkan bahwa : Pertama, akses warga desa terhadap lembaga pendidikan dapat terjangkau meskipun SMP dan SMA tidak terletak di Ohoiren melainkan di Ohoi Ohoira dengan waktu perjalanan tidak lebih dari 10 menit dan tersedianya lembaga pendidikan (Sekolah Dasar) di Ohoiren membuat akses terhadap lembaga pendidikan dapat terjangkau. Kualitas pendidikan di Ohoiren, melalui pemerintah ohoi melakukan pembangunan perumahan guru karena permintaan guru untuk sekolah di ohoiren sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Ohoi. Meskipun hanya di Ohoi, sekolah mengikuti standar pendidikan nasional melalui kurikulum yang berlaku di Sekolah Dasar Naskat Ohoiren menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dapat terlihat.

Kedua, layanan pendidikan pra sekolah di ohoiren sangat terlihat karena adanya bukti infrastruktur Paud dan Taman Kanak-kanak di Ohoi sendiri. Selain itu, pendidikan pra sekolah yang di Ohoiren akan dikembangkan oleh pemerintah ohoi yang dimana adanya pendidikan pasca sekolah yakni pendidikan non formal melalui sekolah lansia dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat. Ketiga, penyediaan perpustakaan desa ohoiren terlihat jelas melalui pemerintah ohoi ohoiren dalam pembangunan gedung perpustakaan Ohoiren. Ketersediaan buku-buku dalam perpustakaan dapat dikatakan minim serta kurangnya minat baca masyarakat ohoiren di perpustakaan. Hal tersebut membuat pemerintah Ohoi Ohoiren menutup sementara perpustakaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terhadap pembangunan di Ohoi Ohoiren Kabupaten Maluku Tenggara, sebagian masyarakat Ohoiren masih dikategorikan miskin ekstrim. Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah Ohoi Ohoiren untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu : membangun pariwisata Ohoi di teluk Ohoi Ohoiren serta promosi usaha *embal* (makanan lokal) milik masyarakat di pesisir Kecamatan Kei Kecil Barat oleh Pemerintah Ohoi Ohoiren. Walaupun demikian terdapat kendala dalam masyarakat yakni pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, dari kedua variabel pada masing-masing indikator, disimpulkan bahwa Ohoi Ohoiren dalam pemanfaatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendapatkan nilai 50% telah dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk perlu melakukan evaluasi yang serius terhadap pemanfaatan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dari pemerintah daerah terhadap pemerintah ohoi dan dari pemerintah ohoi terhadap Badan Saniri Ohoi, serta masyarakat. Hal ini menjadi *warning* (perhatian), karena pembangunan berbasis *Sustainable*

Development Goals (SDGs), bukan hanya dikerjakan oleh pemerintah Ohoi namun oleh seluruh elemen yang ada di ohoi (Pemerintah Ohoi, Badan Saniri Ohoi, Masyarakat dan Pemuda).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, R. (2021). Pendataan Sdgs Desa Untuk Desa Tanpa Kemiskinan. Sukabumi : Farha Pustaka, ISBN : 978-623-368-000-4.
- [2] Alisjahbana, dkk. (2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : Konsep, Target dan Implementasi Strategi (Edisi ke-2). Bandung : Unpad Pers, ISBN : 9786024393137.
- [3] <https://sidn.kemendesa.go.id/sdgs>
- [4] Mulyadi, M. (2009). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa : Ciputat : Nadi Pustaka, ISSN/ISBN : 978-602-95005-2-3.
- [5] Mulyadi, M. (2015). Pembangunan Berkelanjutan : Dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Jakarta : Azza Grafika, ISSN/ISBN : 97860212247525.
- [6] Nur, A. Y. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. Sukowati : Jurnal Litbang, ISSN : 2580-541, e-ISSN : 3356.
- [7] Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MPD TT) Tentang Sustainable Development Goals.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri (PerMenDa Gri) Republik Indonesia (RI) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- [9] Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada 4 Juli 2017.
- [10] Pramono, Z. (2019). Membangun Desa Wisata Untuk Meningkatkan Ekonmo Kerakyatan. Surabaya : CV Rubrik, ISBN : 978-23-7224-02-0.
- [11] Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945.